

BAB I

PENDAHULUAN

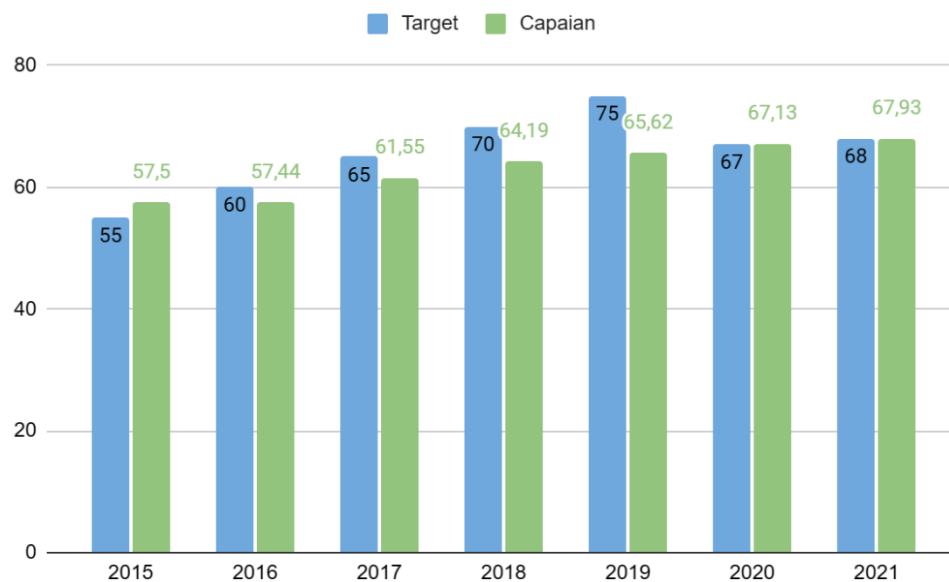
1.1 Latar Belakang

Sebagai organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terus memperbaiki tata kelola organisasinya demi mewujudkan *good governance*. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah menjadi penting dan tidak bisa diabaikan. Untuk itu, pemerintah menerapkan suatu sistem akuntabilitas yang terkait dengan kinerja pemerintah. Pertanggungjawaban terhadap implementasi sistem akuntabilitas tersebut kemudian dituangkan dalam yang disusun secara periodik (Junedah, 2019).

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dievaluasi setiap tahunnya. Evaluasi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berwenang untuk mengatur manajemen instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat implementasi AKIP dalam mendukung capaian kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil dan tepat sasaran. Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selanjutnya diinterpretasikan kedalam predikat antara lain predikat AA, predikat A, predikat BB, predikat B, predikat CC, predikat C, dan predikat D.

Penilaian implementasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap seluruh instansi pemerintahan, seperti kementerian atau lembaga sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen rencana strategis, Kementerian PAN & RB menargetkan nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional sebesar 75 (Sangat Baik). Namun, hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional masih berada dibawah target seperti yang tersaji pada Gambar I.1.

Gambar I. 1 Perbandingan Target dan Capaian Nilai Rata-Rata AKIP Nasional

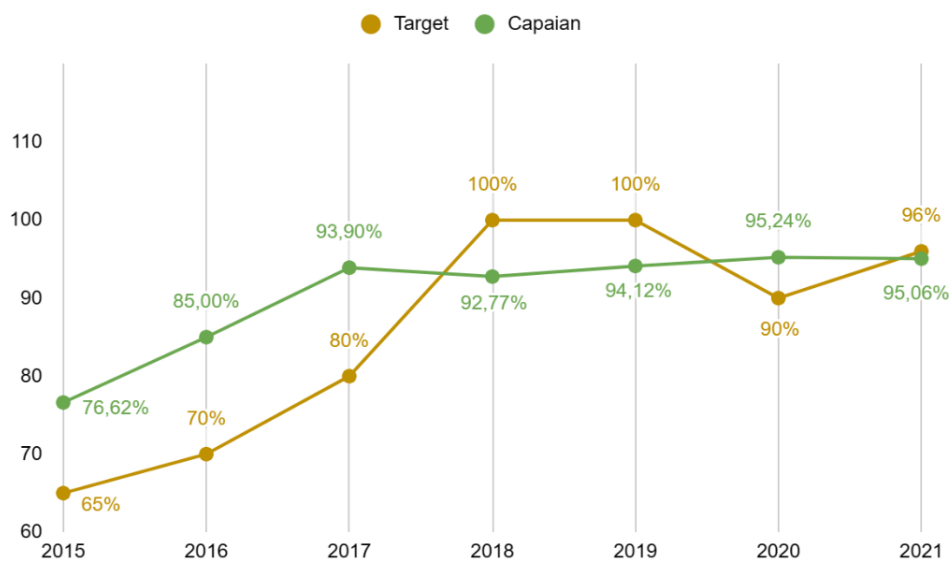


Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Kementerian PAN & RB

Kementerian/Lembaga sebagai instansi pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan contoh dalam implementasi *good governance* bagi pemerintah daerah. Kementerian PAN & RB menetapkan target yang tinggi untuk capaian kementerian/lembaga yang memiliki akuntabilitas kinerja dengan kategori “Baik”. Namun, hasil evaluasi AKIP menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2021, capaian tersebut masih berada dibawah target yang ditetapkan. Grafik

perbandingan target dan capaian kategori “Baik” untuk kementerian/lembaga dapat digambarkan pada Gambar I.2.

Gambar I. 2 Perbandingan Target dan Capaian Predikat “Baik” untuk K/L



Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Kementerian PAN & RB

Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi tidak hanya peran dan tugas Kementerian PAN & RB, tetapi juga menjadi komitmen yang wajib dimiliki oleh seluruh instansi pemerintah. Beberapa hal dapat mempengaruhi hasil penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain opini audit (Andani et al., 2019; Azis & Rahmayati, 2022; Ditasari & Sudrajat, 2020; Kusuma & Kurniasih, 2017; Sutopo et al., 2017), penerapan TIK (Arifin & Muchlis, 2020; Azis & Rahmayati, 2022; Chintya, 2015; Junedah, 2019; Mauliziska et al., 2015; Nasir & Oktari, 2011), tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Chintya, 2015; Junedah, 2019; Nasir & Oktari, 2011; Supriatna, 2016), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Junedah, 2019), kejelasan anggaran

(Anjarwati, 2012; Isnanto et al., 2019), pengendalian akuntansi (Anjarwati, 2012; Isnanto et al., 2019; Pratama et al., 2019), sistem pelaporan (Anjarwati, 2012; Isnanto et al., 2019; Pratama et al., 2019), kompetensi SDM (Mauliziska et al., 2015; Noormansyah & Sirkomba, 2022; Radinda & Saleh, 2021), ukuran instansi (Andani et al., 2019), dan ketaatan peraturan (Mauliziska et al., 2015; Riantiarno & Azlina, 2011).

Saat ini penggunaan teknologi informasi sudah masif digunakan untuk mendukung tata kelola organisasi. Sebagai bentuk adaptasi perkembangan kondisi dan lingkungan, pemerintah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi di pemerintahan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018. Tujuan SPBE yaitu menyediakan layanan terbaik, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Tujuan tersebut serupa dengan tujuan dari adanya e-government (Orantes-jiménez et al., 2015). Penelitian oleh Junedah (2019) menunjukkan bahwa penerapan SPBE memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang mengaitkan SPBE dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini belum umum dilakukan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan dari Azis & Rahmayati (2022) dan Andani et al. (2019) mengenai opini audit memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara opini audit dengan kinerja pemerintah daerah. Beberapa tahun terakhir, sebagian besar instansi berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, terdapat dua kementerian pada tahun 2018 dan 2020 yang

memperoleh predikat AKIP “Memuaskan” meskipun hasil opini audit laporan keuangan adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Akuntabilitas kinerja di instansi pemerintahan tidak terlepas dari sistem pengendalian yang dijalankan oleh instansi tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan mengeluarkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Penelitian oleh Chintya (2015), Jatmiko (2020), Nasir & Oktari (2011), dan Supriatna (2016) menyebutkan bahwa maturitas SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Serupa dengan itu, Junedah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara maturitas SPIP dengan akuntabilitas kinerja. Meskipun demikian, salah satu kementerian pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 memiliki nilai AKIP “Baik” meskipun tingkat maturitas SPIP yang dimiliki adalah Level 1 (Rintisan).

Uraian yang telah dijabarkan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kecenderungan implementasi SPBE, opini audit, dan maturitas SPIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Keterbaruan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian merupakan kementerian/lembaga. Umumnya, penelitian terkait AKIP dilakukan terhadap pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menggabungkan faktor implementasi SPBE, opini audit, dan maturitas SPIP untuk mengetahui kecenderungannya terhadap AKIP. Penelitian dilakukan menggunakan data untuk rentang tahun terbaru yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini membahas kecenderungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opini audit, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 2) Objek yang diteliti adalah lembaga pemerintah pusat yang terdiri atas Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Alat Negara, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.
- 3) Data yang digunakan adalah data evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berupa predikat, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opini audit atas laporan keuangan, dan evaluasi atas kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2018 s.d. 2022.
- 4) Data penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh dari Kemenpan RB, data opini audit laporan keuangan diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan data penilaian atas tingkat kematangan SPIP diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opini audit, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki kecenderungan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti empiris serta analisis atas kecenderungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), opini audit, dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti. Hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan terkait faktor-faktor yang memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan.
- 2) Bagi Lembaga Pemerintah Pusat. Hasil penelitian mampu memberikan informasi kepada lembaga pemerintah pusat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada lembaga pemerintah pusat mengenai pentingnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengendalian internal yang memadai, dan pengelolaan keuangan yang baik bagi kinerja instansi.

- 3) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Penelitian yang dihasilkan dapat memperbanyak referensi dan menambah kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor yang menjadi variasi dari perolehan akuntabilitas kinerja di suatu instansi pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian akan dijabarkan kedalam lima bab. Setiap bab akan disampaikan dengan beberapa subbab untuk memudahkan pemahaman pembaca. Sistematika penulisan hasil penelitian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum berupa alasan dilakukannya penelitian, ruang lingkup, daftar permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini disampaikan teori-teori yang mendasari pembahasan dan analisis hasil penelitian. Landasan teori yang digunakan adalah teori stewardship, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, opini audit laporan keuangan, dan teori mengenai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu, pada bab ini juga akan dijabarkan hasil tinjauan atas penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran yang diterapkan, dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan gambaran umum dari objek yang diteliti, jenis penelitian, data dan sumbernya, serta sampel penelitian. Pada bab ini juga akan disampaikan penjelasan atas operasionalisasi variabel, metode analisis data, serta sarana pendukung penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil pemilihan sampel, analisis data statistik deskriptif, dan analisis data statistik inferensial. Selain itu, dalam bab ini akan disampaikan pembahasan dari hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disampaikan simpulan atas hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan kepada berbagai pihak. Simpulan disusun untuk menjawab tujuan dari penelitian. Bab ini juga menguraikan keterbatasan yang ada pada penelitian yang dilakukan.